

The Effectiveness of the Regional Public Service Agency Information System (SIBLUD) in Financial Management at the Buduran Community Health Center, Sidoarjo Regency

[Efektivitas Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Puskesmas Buduran Kabupaten Sidoarjo]

Sarah Safira Khoirani¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of the Regional Public Service Agency Information System (SIBLUD) in financial management at the Buduran Health Center, Sidoarjo Regency based on the theory of Richard M. Steers (1985) through three indicators: goal achievement, integration, and adaptation. The research uses a descriptive qualitative approach with purposive sampling techniques, involving the treasurer as the admin and financial staff of the BOK. Data was obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results show that SIBLUD is quite effective in accelerating the preparation of financial statements, SPJ, and budget management. In the indicator of achieving goals, the system has been proven to be able to increase efficiency even though it is still constrained by technical errors and manual inputs. The integration indicator runs well through a centralized system and routine information delivery. However, in the adaptation indicator, senior staff still have difficulty using the digital system. This research emphasizes the importance of system stability, sustainable information delivery, and improving digital literacy as an effort to optimize SIBLUD*

Keywords - Effectiveness, Blud Information System, Health Center, Financial Management, Richard M. Steers

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori Richard M. Steers (1985) melalui tiga indikator: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melibatkan bendahara sebagai admin dan staf keuangan BOK. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa SIBLUD cukup efektif dalam mempercepat penyusunan laporan keuangan, SPJ, dan pengelolaan anggaran. Pada indikator pencapaian tujuan, sistem terbukti mampu meningkatkan efisiensi meskipun masih terkendala error teknis dan input manual. Pada indikator integrasi berjalan baik melalui sistem terpusat dan penyampaian informasi rutin. Namun, pada indikator adaptasi, staf senior masih mengalami kesulitan menggunakan sistem digital. Penelitian ini menekankan pentingnya stabilitas sistem, penyampaian informasi berkelanjutan, dan peningkatan literasi digital sebagai upaya optimalisasi SIBLUD.*

Kata Kunci - Efektivitas, Sistem Informasi BLUD, Puskesmas, Pengelolaan Keuangan, Richard M. Steers

I. PENDAHULUAN

Di era modern ini, pemerintah sebagai peran utama di sebuah negara diharapkan mampu menguasai teknologi informasi serta digitalisasi demi memenuhi layanan untuk masyarakat [1]. Teknologi informasi dapat menjadi pendorong utama perubahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, semua prosedur administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual atau analog perlu diganti. Pemanfaatan teknologi dapat membantu operasi pemerintahan menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif. Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, pemerintah juga semakin giat dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi elektronik atau e-government. Agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam layanan publik, sektor publik perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penerapan e-government yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. E-Government melibatkan berbagai aspek, mulai dari digitalisasi prosedur administrasi hingga penyediaan layanan masyarakat melalui platform online [2].

Secara umum e-government bisa diartikan dengan penerapan teknologi digital untuk mengubah sistem kerja pemerintahan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas penyampaian layanan publik. Pemerintahan elektronik atau e-government ini berfokus pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang lebih transparan dan efektivitas [3]. Konsep awal e-government di Indonesia diawali dari diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 yang berisi terkait Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan e-government [4]. Manfaat dari e-government yaitu memperkuat hubungan serta jaringan komunikasi antar individu maupun antar instansi, meningkatnya efektivitas dan keefisienan dalam pelaksanaan layanan, penyediaan serta pemberian layanan maupun informasi yang lebih cepat, mudah serta terjangkau, menambah transparansi, pengawasan serta tanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan, dan memberikan peluang pendapatan baru untuk pemerintah [5]. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik, penerapan e-government di Indonesia kemudian diperkuat melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Regulasi ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan digital yang terintegrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, efektif, transparan, serta akuntabel.

Dalam bahasa Inggris, *effective* artinya berhasil ataupun dilaksanakan secara baik. Dalam kamus ilmiah efektivitas diartikan dengan penetapan, hasil penggunaan, ataupun kesesuaian dengan tujuan. Efektivitas biasanya didefinisikan sebagai seberapa jauh suatu tujuan yang sudah ditentukan berhasil dicapai. Konsep ini biasanya dihubungkan dengan perbedaan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang benar-benar tercapai. Oleh karena itu, penilaian efektivitas sebuah program penting dilaksanakan guna mengetahui manfaat serta dampak yang dihasilkan, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan program tersebut [6]. Teori yang dikemukakan oleh Richard M Steers tahun 1985 ini mencakup tiga indikator yang berkaitan dengan efektivitas, yakni indikator pertama adalah pencapaian tujuan, kedua ialah integrasi, serta ketiga ialah adaptasi [7].

Puskesmas atau pusat pelayanan kesehatan masyarakat merupakan unit layanan yang berfungsi menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, puskesmas juga memiliki tugas memantau kondisi kesehatan melalui penyuluhan dan upaya pencegahan penyakit guna mengurangi angka kesakitan di wilayah setempat. Sebagai layanan kesehatan tingkat pertama, puskesmas memegang peran penting sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 menyebutkan bahwasanya puskesmas ialah fasilitas yang menyediakan layanan kesehatan, melaksanakan program kesehatan masyarakat serta upaya kesehatan individu pada tingkat pertama, serta berfokus terhadap pelayanan yang bertujuan mendorong dan mencegah penyakit di wilayah kerjanya [8].

Dalam menjalankan fungsi tersebut, puskesmas tidak hanya membutuhkan kapasitas teknis dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga dukungan administratif dan manajerial yang memadai. Salah satu aspek penting yang menentukan keberlangsungan program dan pelayanan di puskesmas adalah pengelolaan keuangan. Setiap kegiatan membutuhkan dukungan pendanaan yang dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan, sehingga kemampuan puskesmas dalam mengatur keuangannya menjadi faktor kunci bagi kelancaran operasional dan keberlanjutan layanan kesehatan di tingkat pertama. Keuangan merupakan cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada bagaimana dana dan sumber daya finansial lainnya digunakan, dimanfaatkan dan dikelola. Hal ini meliputi semua aspek yang berkaitan dengan perolehan, pemanfaatan, serta tata kelola keuangan dan berbagai sumber daya lainnya. Selain itu, keuangan meliputi kegiatan penelitian, analisis, dan praktik yang berkaitan dengan arus dan pengelolaan uang dalam berbagai konteks, baik pada tingkat individu, perusahaan, maupun lembaga publik. Sebagai layanan kesehatan pertama di Indonesia, puskesmas berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Puskesmas membutuhkan dana yang cukup dan manajemen yang baik untuk beroperasi. Pengelolaan keuangan yang efektif di puskesmas begitu krusial untuk memastikan kelangsungan operasional dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Puskesmas, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan efisien [9].

Transformasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi keuangan. Dengan mengotomatiskan berbagai proses keuangan, seperti manajemen kas, pengelolaan faktur, dan penyusunan laporan keuangan, transformasi digital dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh manusia, meningkatkan akurasi, serta mempercepat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut. Penggunaan teknologi keuangan yang canggih juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan prediksi dengan lebih akurat [10]. Di Puskesmas Buduran menerapkan website Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) dalam pengelolaan keuangan sejak 2024. Sistem Informasi Blud (SIBLUD) adalah website yang digunakan untuk mengelola keuangan puskesmas, penyelesaian laporan keuangan, pembuatan SPJ selama perjalanan dinas, dan pembelian modal puskesmas. Website Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) Kabupaten Sidoarjo merupakan sistem yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sistem tersebut dikembangkan dan dijalankan oleh PUSDATIN IT Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang bertugas menangani pengelolaan data dan teknologi informasi kesehatan daerah. Dalam pengoperasiannya, server website SIBLUD berada

di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (KOMINFO) sebagai pusat pengelolaan infrastruktur dan jaringan sistem pemerintahan daerah. Tujuan dari Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) adalah untuk membantu pemerintah daerah dan unit BLUD dalam mengelola administrasi serta keuangan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem ini digunakan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan, pengelolaan anggaran, hingga monitoring pendapatan dan belanja pada fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas dan rumah sakit daerah. Dengan adanya SIBLUD, proses pengelolaan keuangan yang sebelumnya dilaksanakan manual bisa dilaksanakan secara digital sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelaporan.

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) memiliki berbagai menu yang saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan di puskesmas secara efektif dan efisien. Menu Dashboard menampilkan ringkasan informasi utama terkait anggaran, realisasi belanja, serta data keuangan dalam bentuk grafik dan angka agregat sehingga memudahkan pemantauan kondisi keuangan secara umum. Menu Master berisi data dasar seperti data pegawai, unit kerja, jenis belanja, dan kategori akun yang menjadi acuan sistem agar setiap transaksi sesuai dengan struktur data yang benar. Menu Puskesmas menyediakan informasi mengenai identitas dan profil puskesmas, termasuk kode unit dan alamat, serta mengatur akses pengguna sesuai unit masing-masing. Selanjutnya, menu Users digunakan untuk mengelola akun pengguna seperti admin, bendahara, dan kepala puskesmas, termasuk pengaturan hak akses. Menu Penyedia berfungsi memuat data pihak ketiga atau vendor penyedia barang serta jasa yang ikut andil pada proses pengadaan. Menu Kode Rekening berisi daftar akun keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah untuk mengklasifikasikan pendapatan dan belanja. Menu Pendapatan digunakan untuk mencatat dan memantau sumber dana puskesmas, baik dari APBD, BOK, maupun layanan BLUD. Sementara itu, menu Pagu Anggaran menampilkan total alokasi dana dari berbagai sumber sebagai acuan batas maksimal penggunaan anggaran. Menu Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menampilkan sisa dana dari tahun sebelumnya yang masih dapat digunakan untuk perencanaan keuangan tahun berjalan. Menu Belanja digunakan untuk mencatat berbagai jenis pengeluaran, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Selanjutnya, menu Rekap Pendapatan menyajikan ringkasan data penerimaan dana dari berbagai sumber, sedangkan Pendapatan Perbulan menampilkan rincian pendapatan berdasarkan bulan agar tren keuangan mudah dipantau. Menu BLUD, APBD, dan BOK masing-masing berfungsi mengelola transaksi keuangan sesuai sumber dananya. Kemudian, menu RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) digunakan untuk menyusun dan mengedit dokumen perencanaan tahunan keuangan puskesmas, sedangkan menu Kegiatan mencatat pelaksanaan program dan hasil kegiatan yang didanai dari berbagai sumber. Terakhir, menu Laporan berfungsi menghasilkan berbagai jenis laporan keuangan dan kegiatan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan, dan laporan BLUD, yang menjadi dasar dalam evaluasi serta pertanggungjawaban keuangan puskesmas. Website Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) ini berperan penting dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas Buduran dengan mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem tersebut membantu menaikkan efisiensi serta akurasi pada pengelolaan keuangan, termasuk dalam pembuatan laporan dan pengelolaan anggaran. Penerapan sistem ini juga sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum pengaturan tentang BLUD, termasuk fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pelayanan di Puskesmas. Berikut ini merupakan tampilan awal dari website Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) puskesmas Buduran:



Gambar 1. Tampilan Website SIBLUD

Sumber : Puskesmas Buduran

Namun dalam penggunaan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran masih menghadapi beberapa masalah. Pertama, saat sistem mengalami maintenance atau error, aplikasi tidak dapat

diakses yang berdampak pada kelancaran proses administrasi. Kedua, pada awal implementasi SIBLUD, admin mengalami kesulitan karena harus membuat akun pegawai satu per satu, menambahkan nama tempat yang belum tersedia, serta menginput nama kegiatan secara manual jika tidak ada dalam sistem. Ketiga, terdapat hambatan dalam proses adaptasi, terutama dalam mengajari bidan yang sudah lanjut usia, karena mereka cenderung enggan untuk mempelajari dan menggunakan sistem baru. Kendala-kendala tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap efektivitas penerapan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran. Gangguan sistem saat maintenance atau error menyebabkan terhentinya aktivitas administrasi, sehingga proses pelaporan dan pencatatan transaksi menjadi tertunda mengakibatkan alur kerja menjadi tidak efisien. Kesulitan awal dalam pembuatan akun dan input data secara manual juga memperlambat proses implementasi sistem serta meningkatkan beban kerja admin, terutama ketika harus memastikan seluruh data pegawai dan kegiatan terinput dengan benar. Sementara itu, hambatan adaptasi pada tenaga kesehatan yang berusia lanjut berdampak pada ketimpangan kemampuan penggunaan sistem antarpegawai yang akhirnya menghambat koordinasi dan keterpaduan kerja dalam operasional Puskesmas. Selain itu, kurangnya kemampuan sebagian pegawai dalam mengoperasikan SIBLUD juga menyebabkan keterlambatan dalam proses input data dan penyusunan laporan keuangan, sehingga waktu pelaporan menjadi terhambat.

Teori efektivitas organisasi yang dikembangkan oleh Richard M. Steers (1985) memberikan kerangka konseptual yang signifikan dalam menilai kinerja suatu organisasi melalui tiga indikator utama, yakni pencapaian tujuan, integrasi, serta adaptasi [7]. Indikator pertama yaitu pencapaian tujuan, Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran memiliki permasalahan yang dihadapi seperti aplikasi yang mengalami kendala teknis yang menghambat proses kerja, seperti ketika sistem mengalami error atau tidak bisa dibuka saat proses maintenance. Selain itu, pada masa awal implementasi SIBLUD, admin mengalami kesulitan karena harus membuat akun pegawai satu per satu, menambahkan nama tempat, serta menginput nama kegiatan secara manual apabila tidak tersedia dalam daftar sistem. Indikator kedua ialah integrasi, dalam hal ini implementasi SIBLUD di Puskesmas Buduran telah menunjukkan upaya integrasi yang cukup baik, karena seluruh bagian administrasi dan pengelolaan keuangan kini terpusat dalam satu sistem, sehingga mempermudah pelaporan dan rekapitulasi meskipun masih ada kendala teknis yang perlu dibenahi. Ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur internal, organisasi telah mulai bergerak menuju sistem kerja yang lebih terintegrasi. Sementara itu, indikator ketiga yaitu adaptasi dimana dalam SIBLUD permasalahan muncul ketika sistem baru seperti SIBLUD harus digunakan oleh tenaga kesehatan yang berusia lanjut, khususnya bidan yang sudah lanjut usia. Banyak dari mereka menunjukkan resistensi atau keengganan untuk belajar menggunakan sistem digital, sehingga menyulitkan proses adaptasi dan menghambat efektivitas penggunaan sistem secara menyeluruh.

Dalam penyusunan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai pedoman. Penelitian-penelitian tersebut sebelumnya juga telah dimanfaatkan oleh peneliti lain sebagai acuan, sehingga menjadi landasan dalam mengkaji penelitian ini di antaranya adalah: Pertama, studi ini dilaksanakan oleh Maulidya Rahmah dan Rahmi Hayati 2020, yang berjudul “Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Melalui menerapkan metode deskriptif kualitatif, kajian ini mengumpulkan data dengan cara wawancara terhadap lima informan yang berperan pada pengelolaan keuangan desa. Hasil kajian memperlihatkan bahwasanya implementasi aplikasi SISKEUDES telah efektif dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan keuangan desa. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam proses penginputan data, seperti kesalahan dalam pencocokan sub-bidang serta hambatan administratif terkait surat permintaan pembayaran (SPP) yang dapat memperlambat pencairan dana. Meskipun demikian, aplikasi ini tetap dinilai membantu pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini ialah sama-sama menerapkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sementara perbedaan penelitian terdahulu meneliti SISKEUDES yang diterapkan pada pengelolaan keuangan desa, sementara penelitian saat ini meneliti SIBLUD yang diterapkan pada pengelolaan keuangan di Puskesmas [11].

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuladzul Fitrohtil Huda Firdaus dan M. Agus Cholik 2024, yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi”. Tujuan dari kajian ini adalah guna mengetahui efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi SIPD di Kota Bekasi masih belum berjalan efektif dalam menunjang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi sulitnya akses aplikasi, keterbatasan fitur yang belum mampu mengakomodasi seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, serta kurang optimalnya sarana yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari segi faktor sosial, penggunaan SIPD lebih dipengaruhi oleh tekanan regulasi daripada kebutuhan nyata pengguna, sementara dari aspek kondisi yang memfasilitasi, meskipun fasilitas di Pemerintah Kota Bekasi sudah cukup memadai, dukungan teknis dan infrastruktur

dari pusat masih kurang optimal. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang ialah sama-sama membahas terkait efektivitas sistem informasi keuangan. Sedangkan untuk perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan teori UTAUT (Unified Theory of Accepted and Use of Technology) terkait adopsi dan penerimaan teknologi oleh pengguna dalam sistem pemerintahan daerah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan teori dari (Richard M Steers 1985) terkait efektivitas [12].

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Atika Santya Putri, et.al., 2023 yang berjudul “Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sistem Syncore dalam Menyajikan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Puskesmas Kalangsari)” bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem Syncore dapat membantu pada penyusunan laporan keuangan di Puskesmas Kalangsari, Karawang. Temuan kajian memperlihatkan bahwasanya sistem Syncore efektif untuk menyajikan laporan keuangan karena memenuhi berbagai indikator efektivitas, seperti ketepatan waktu, ketepatan pengukuran, dan kemudahan dalam penyusunan laporan. Selain itu, sistem ini juga dinilai efisien karena mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses pencatatan serta penyusunan laporan keuangan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa fitur dalam sistem Syncore yang belum dioptimalkan penggunaannya dan masih memerlukan evaluasi serta perbaikan lebih lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem Syncore telah membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan keuangan di Puskesmas Kalangsari, meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan guna meningkatkan fungsionalitasnya di masa mendatang. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mempunyai kesamaan dengan penelitian saat ini yakni sama-sama membahas mengenai efektivitas sistem informasi keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan Sistem Syncore, sementara penelitian sekarang melalui Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) [13].

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ivan Eko Hardi Pramudio dan Ilmi Usrotin Choiriyah (2025), yang berjudul "Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Perwujudan E-Government di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo". Studi ini tujuannya guna mengetahui efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mendukung perwujudan e-government di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Studi ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Fokus kajian menerapkan teori efektivitas DeLone dan McLean yang terdiri dari indikator sumber daya manusia, kualitas sistem, serta kualitas informasi. Temuan kajian memperlihatkan bahwasanya penerapan SISKEUDES telah membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan desa melalui pencatatan dan pelaporan yang lebih sistematis. Tetapi, pada pelaksanaannya masih didapatkan berbagai kendala, misalnya keterbatasan sumber daya manusia, kualitas sistem yang belum stabil, dan kurang optimalnya pengelolaan informasi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini ialah sama-sama menerapkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan membahas efektivitas sistem informasi keuangan daerah. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti efektivitas aplikasi SISKEUDES pada pengelolaan keuangan desa, sementara penelitian saat ini meneliti efektivitas website SIBLUD dalam pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas [14].

Dalam penjelasan tersebut penelitian ini dilakukan agar bisa mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) dalam pengelolaan keuangan di puskesmas Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari kajian ini ialah menganalisis dan mendeskripsikan secara konkret mengenai efektivitas Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas Buduran Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers (1985) yang mencakup tiga indikator utama, yakni pencapaian tujuan, integrasi, serta adaptasi.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian deskriptif ini, data yang diperoleh berupa narasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang didapat dari pengamatan terhadap perilaku, tindakan, dan pandangan dari subjek yang diteliti. Tujuan penelitian ini ialah guna menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) dalam pengelolaan keuangan di puskesmas buduran kabupaten sidoarjo. Penelitian ini berlandaskan pada konsep teori efektivitas yang dinyatakan oleh Richard M. Steers (1985), yang mencakup tiga indikator utama, yakni pencapaian tujuan, integrasi, serta adaptasi.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yakni melalui memilih informan yang disebut memiliki pemahaman baik terkait topik masalah yang diangkat. Informan dalam penelitian adalah Bendahara puskesmas buduran sebagai admin, dan staff admin keuangan BOK puskesmas Buduran yang memiliki keterkaitan dengan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) yang berbasis website. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti wawancara mendalam, observasi di lapangan, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul mencakup data primer yang diperoleh melalui interaksi langsung berupa wawancara serta pengamatan, dan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, arsip resmi,

maupun laporan terkait lainnya. Proses analisis data dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Di tahapan pengumpulan data, peneliti mengumpulkan berbagai informasi dari observasi dan wawancara. Proses reduksi dilakukan dengan memilih data yang sesuai dengan fokus kajian serta menghapus informasi yang tak relevan. Selanjutnya, data yang telah dipilih disusun berbentuk narasi guna mempermudah proses interpretasi. Akhirnya, kesimpulan menarik secara bertahap serta terus diverifikasi sepanjang penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ini di Puskesmas Buduran Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Jawa No.2, Banarmelati, Wadungasih, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) merupakan salah satu bentuk implementasi E-Government dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas. Aplikasi ini digunakan oleh Puskesmas Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung proses penyelesaian pelaporan keuangan, pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selama perjalanan dinas, dan pembelian modal puskesmas. Melalui SIBLUD, proses administrasi keuangan yang sebelumnya dilaksanakan secara manual kini bisa dilaksanakan secara digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Berlandaskan temuan penelitian yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan analisis data, kesimpulannya efektivitas penggunaan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran belum sepenuhnya berlangsung maksimal. Dilihat dari berbagai kendala yang masih ditemui dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, kajian ini dianalisis menerapkan teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers (1985) dengan tiga indikator utama, yakni pencapaian tujuan, integrasi, serta adaptasi. Ketiga indikator ini diterapkan guna menilai sejauh mana SIBLUD mampu mendukung kelancaran pengelolaan keuangan secara efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

A. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas organisasi menurut teori Richard M. Steers. Indikator ini mengukur sejauh mana sebuah organisasi mampu mewujudkan hasil yang sudah direncanakan secara efisien dan sesuai target. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran, pencapaian tujuan mencerminkan keberhasilan sistem dalam mendukung kelancaran administrasi, percepatan proses pengelolaan keuangan, serta penyusunan laporan kegiatan yang akurat dan tepat waktu.

Keberhasilan pencapaian tujuan dalam penggunaan SIBLUD dapat ditinjau dari efisiensi alur kerja yang dihasilkan oleh sistem, kecepatan dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan kemampuan sistem dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna. Sebelum adanya aplikasi SIBLUD, proses pembuatan SPJ memerlukan waktu sekitar 10 hingga 15 menit karena dilakukan secara manual, namun setelah menggunakan SIBLUD proses tersebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Hal ini menandakan bahwasanya sistem berdampak positif terhadap efisiensi waktu dan beban kerja pegawai.

Tabel 1. Perbandingan Waktu Penyusunan Administrasi Keuangan Sebelum dan Sesudah Menggunakan SIBLUD

No.	Jenis Kegiatan Administrasi	Sebelum Menggunakan SIBLUD	Sesudah Menggunakan SIBLUD
1.	Penyusunan SPJ Perjalanan Dinas	10-15 menit	5 menit
2.	Rekap Laporan Keuangan	±20 menit	±10 menit
3.	Pencarian Data Laporan	±10 menit	±5 menit

Sumber : Diolah Penulis 2025

Berdasarkan tabel 1 bisa diketahui bahwa penggunaan SIBLUD mampu meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi keuangan di Puskesmas Buduran. Berbagai kegiatan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dikerjakan dengan lebih cepat dan terstruktur melalui sistem digital. Proses penyusunan SPJ, rekap laporan keuangan, hingga pencarian data laporan menjadi lebih mudah karena seluruh data telah tersimpan dan terintegrasi dalam satu sistem. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SIBLUD memberikan dampak

positif terhadap kelancaran pengelolaan keuangan serta membantu mempercepat proses kerja pegawai di Puskesmas Buduran.

Tetapi, berlandaskan hasil pengamatan di lapangan, masih adanya beberapa kendala teknis yang menghambat proses pencapaian tujuan. Salah satu kendala yang sangat sering terjadi ialah ketika sistem mengalami error atau tidak dapat diakses karena proses maintenance yang menyebabkan seluruh aktivitas administratif terhenti sementara. Selain itu, pada masa awal implementasi, admin mengalami kesulitan karena harus membuat akun pegawai satu per satu, menambahkan nama tempat, serta menginput nama kegiatan secara manual apabila belum tersedia dalam daftar sistem. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dea Afifah Nabilahicha, A.Md selaku admin SIBLUD di Puskesmas Buduran:

“Awal-awal saya buat akun semua pegawai satu-satu. Terus kalau ada kegiatan atau tempat yang belum ada di sistem, harus saya input manual dulu. Kalau enggak, mereka enggak bisa lanjut buat SPJ. Jadi kerjaan agak lambat, apalagi kalau sistemnya pas error atau maintenace, ya berhenti semua”. (Hasil wawancara, 14 Mei 2025)

Sementara itu dari sisi pengguna juga merasakan dampak dari keterbatasan sistem dalam mendukung kecepatan kerja. Ketika data belum tersedia atau system error, mereka harus menunggu intervensi dari admin. Hal ini berpengaruh pada keterlambatan pengajuan kegiatan dan penyusunan SPJ. Seperti yang disampaikan oleh ibu Indah wahyuni, A.Md.Keb, sebagai staf admin keuangan BOK dan pengguna SIBLUD di Puskesmas Buduran:

“Kalau SIBLUD-nya tidak error itu enak, semua lebih cepat. Tapi kadang saya harus nunggu admin masukin data/nama tempat dulu kalau ngga ada di sistem, dan terkadang sistemnya error. Jadi itu bikin tertunda dan telat dalam mengerjakan SPJ”. (Hasil wawancara, 14 Mei 2025)

Berdasarkan pernyataan kedua narasumber tersebut, bisa diketahui bahwa sistem SIBLUD secara umum telah memberikan manfaat dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan. Namun keterbatasan teknis dan prosedural seperti input manual dan error sistem masih menjadi kendala yang mempengaruhi efektivitas sistem dalam mencapai tujuan organisasi secara maksimal. Oleh karena itu, pengembangan fitur yang lebih responsif dan fleksibel, serta peningkatan stabilitas sistem menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi di Puskesmas.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas SIBLUD di Puskesmas Buduran berdasarkan teori efektivitas organisasi oleh Richard M. Steers, khususnya pada indikator pencapaian tujuan, masih belum berjalan sesuai harapan. Meskipun sistem telah mampu mempercepat beberapa proses kerja, masih diperlukan penguatan dari sisi teknis dan sumber daya manusia. Pemeliharaan sistem yang rutin, pengembangan fitur input yang lebih otomatis, serta pelatihan untuk meningkatkan kemandirian pegawai dalam menggunakan sistem akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi dalam hal pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan tepat waktu.

Hal ini ditunjang dari hasil kajian sebelumnya dari Yuladzul Fitrohtil Huda Firdaus dan M. Agus Cholik pada tahun 2024 yang berjudul “efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi” penelitian ini menjelaskan bahwa sulitnya akses aplikasi dan keterbatasan fitur menjadi kendala utama yang menyebabkan SIPD belum efektif guna mendukung pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan peningkatan dalam pelatihan serta dukungan teknis untuk memastikan penerapan SIPD dapat berjalan lebih efektif dan diterima dengan [12].

B. Integrasi

Integrasi merupakan indikator penting yang mengukur sejauh mana suatu organisasi dapat menyatukan berbagai komponen dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran, integrasi mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi dan proses yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Menurut Richard M. Steers, indikator integrasi mencerminkan kapasitas suatu organisasi untuk membangun komunikasi yang efektif, mencapai konsensus, dan berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk di dalam ataupun di luar organisasi.

Dalam penerapan SIBLUD, proses integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh staf. Sosialisasi merupakan bagian dari proses koordinasi dan komunikasi organisasi, karena melalui sosialisasi informasi mengenai penggunaan sistem dapat disampaikan secara merata kepada seluruh staf sehingga mendukung kesamaan pemahaman dan kelancaran kerja. Sosialisasi memiliki hubungan yang erat dengan proses koordinasi dalam organisasi, karena kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk membangun komunikasi serta menyamakan pemahaman antaranggota organisasi. Melalui sosialisasi, informasi mengenai tujuan, prosedur kerja, pembagian tugas, serta penggunaan sistem dapat disampaikan kepada seluruh staf secara jelas dan terarah. Ketika seluruh pegawai memahami informasi yang sama, maka proses koordinasi akan menjadi lebih mudah dilakukan dan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Keberhasilan integrasi dalam penggunaan SIBLUD dapat diukur melalui sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta efektivitas organisasi dalam mensosialisasikan aplikasi SIBLUD kepada seluruh staf Puskesmas. Semakin baik sosialisasi yang dilakukan, semakin tinggi tingkat pemahaman dan keterlibatan staf dalam menggunakan sistem. Proses sosialisasi yang efektif akan membantu mengurangi resistensi terhadap

perubahan serta meningkatkan adopsi teknologi baru. Maka demikian, penting bagi Puskesmas agar mempunyai prosedur yang jelas dan sistematis dalam melaksanakan sosialisasi SIBLUD.

Secara keseluruhan, indikator integrasi dalam penggunaan SIBLUD di Puskesmas Buduran mencakup dua faktor utama yaitu pertama, prosedur yang jelas dan sistematis untuk memastikan kelancaran komunikasi dan koordinasi, dan yang kedua, yaitu proses sosialisasi yang efektif serta berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman serta keterlibatan staf. Dengan memperhatikan kedua faktor ini, Puskesmas dapat meningkatkan efektifitas SIBLUD dalam pengelolaan keuangan dna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dea Afifah Nabilahicha, A.Md selaku admin Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran:

“Untuk sosialisasi ada, pada awal penggunaan aplikasi, dan biasanya juga dilakukan setiap bulan saat ada rapat minilok.” (Hasil wawancara, 14 Mei 2025)

Selain dari sisi pelaksana, efektivitas integrasi juga dapat dilihat dari perspektif pengguna sistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf pengguna SIBLUD di Puskesmas Buduran, diketahui bahwa proses sosialisasi yang dilakukan cukup membantu dalam memahami alur penggunaan sistem serta mendukung koordinasi antar bagian. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Indah Wahyuni, A.Md.Keb, sebagai staf admin keuangan BOK:

“Waktu awal penggunaan memang dijelaskan saat sosialisasi, jadi kami dikasih tahu alurnya. Kalau ada yang belum paham biasanya bisa tanya ke admin atau jika ada kendala dibahas lagi waktu rapat minilok.” (Hasil wawancara, 14 Mei 2025). Pernyataan tersebut dikuatkan dengan gambar 2 Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SIBLUD Puskesmas Buduran seperti dibawah ini.



Gambar 2: Sosialisasi Aplikasi SIBLUD
Sumber: Puskesmas Buduran

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa sosialisasi mengenai aplikasi SIBLUD telah berjalan dengan baik. Seluruh proses yang berhubungan dengan pengajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kini dilakukan secara terpusat melalui satu sistem digital, sehingga memudahkan koordinasi antarunit kerja. Pihak Puskesmas rutin melakukan sosialisasi, umumnya satu atau dua kali dalam sebulan. Kegiatan sosialisasi ini dinilai cukup efektif dalam membantu staf memahami alur kerja sistem.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran berdasarkan teori efektivitas Richard M. Steers dengan indikator integrasi telah berjalan sesuai harapan. Sistem ini telah mampu menjadi penghubung antar bagian dalam organisasi, mendukung kolaborasi kerja, dan mempercepat proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Agar integrasi semakin kuat, perlu dilakukan pemeliharaan sistem secara rutin dan pelatihan berkelanjutan bagi pengguna agar semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan sistem secara maksimal.

Hal ini ditunjang dengan adanya hasil kajian terdahulu dari Arum Setiyaningsih, dkk tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)” penelitian ini menjelaskan bahwa keberhasilan dalam penerapan sistem informasi keuangan sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi dan kesiapan sumber daya manusia. Dalam studi tersebut, sosialisasi dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas, karena mampu meningkatkan pemahaman aparat desa terhadap alur sistem dan membangun koordinasi kerja yang lebih baik. Temuan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan sosialisasi secara konsisten dan menyeluruh dalam membangun integrasi internal dalam organisasi, agar sistem dapat diimplementasikan secara optimal dan seragam oleh seluruh pengguna [15].

C. Adaptasi

Adaptasi merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas organisasi, sebagaimana dinyatakan oleh Richard M. Steers (1985). Indikator ini mengukur sejauh mana suatu organisasi bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, termasuk internal ataupun eksternal, untuk menjaga kelangsungan operasionalnya dalam menghadapi transformasi sistem dan teknologi. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran, adaptasi menjadi aspek yang sangat relevan karena sistem ini menggantikan proses manual dengan digitalisasi penuh pada pengelolaan keuangan.

Keberhasilan adaptasi dalam penggunaan SIBLUD dapat ditinjau dari kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia di Puskesmas dalam menerima, mempelajari, dan mengoperasikan sistem secara mandiri. Namun berdasarkan hasil lapangan, ditemukan bahwa proses adaptasi belum sepenuhnya berjalan lancar, terutama pada tenaga kesehatan yang berusia lanjut. Para bidan senior yang terbiasa dengan sistem manual menunjukkan resistensi terhadap penggunaan aplikasi digital. Mereka cenderung merasa sistem terlalu rumit dan lebih memilih meminta bantuan pihak lain daripada belajar mengoperasikannya secara mandiri. Hal ini secara langsung memengaruhi efektivitas penggunaan SIBLUD secara menyeluruh dan meningkatnya ketergantungan terhadap admin. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Indah wahyuni, A.Md.Keb, sebagai staf admin keuangan BOK dan pengguna SIBLUD di Puskesmas Buduran:

“Saya sendiri sudah lumayan terbiasa pakai SIBLUD, tapi memang beberapa bidan/staf lain yang lebih senior sering minta bantuan. Kadang kalau ada data yang salah input, mereka langsung minta admin saja yang betulkan padahal bisa dilakukan sendiri dan dipelajari pelan-pelan.” (Hasil wawancara, 14 Mei 2025)



Gambar 3: Menu Kegiatan Website SIBLUD

Sumber: Puskesmas Buduran

Gambar 3 menunjukkan tampilan menu kegiatan dalam website SIBLUD yang digunakan untuk pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sistem ini dirancang secara digital dan terpusat untuk mempermudah proses pelaporan keuangan. Namun, tetap memerlukan pemahaman teknis dari setiap pengguna agar dapat dioperasikan secara mandiri dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Dea Afifah Nabilahicja, A.Md selaku admin SIBLUD Puskesmas Buduran sebagai berikut:

“Bidan-bidan yang sudah senior biasanya langsung minta tolong kalau ada kesalahan. Misalnya salah input data atau kegiatan, mereka enggak mau betulin sendiri. Padahal sistemnya bisa diakses siapa saja. Tapi ya memang mereka lebih nyaman dibantu”. (Hasil wawancara, 14 Mei 2025)

Aplikasi SIBLUD sebenarnya telah dirancang dengan antarmuka yang cukup sederhana dan mudah dipahami khususnya dalam fitur pengajuan SPJ, namun masih banyak bidan senior yang belum mampu mengoperasikannya secara mandiri. Mereka lebih nyaman bergantung pada admin, terutama jika terjadi kesalahan input data atau kegiatan. Sikap ini menunjukkan bahwa kendala dalam adaptasi tidak hanya berasal dari sistem itu sendiri, melainkan dari pola pikir dan kesiapan individu dalam menerima perubahan digital.

Sikap enggan dari sebagian pegawai senior ini menjadi tantangan dalam proses pemerataan penggunaan sistem. Ketika sebagian besar pekerjaan harus kembali dilimpahkan ke admin karena pegawai belum mampu atau mau mengoperasikan SIBLUD secara mandiri, maka efektivitas penggunaan sistem secara menyeluruh ikut terhambat. Proses kerja yang seharusnya sudah bisa dilakukan secara mandiri menjadi tidak efisien karena masih melibatkan peran admin secara terus-menerus dalam proses yang bersifat operasional.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) di Puskesmas Buduran berdasarkan teori efektivitas Richard M. Steers, khususnya pada indikator adaptasi masih memerlukan perhatian khusus. Meskipun sistem telah tersedia dan difungsikan secara menyeluruh, kesiapan pengguna

terutama tenaga kesehatan yang lebih senior belum merata. Agar proses adaptasi berjalan sesuai harapan, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif terhadap pegawai yang enggan belajar, serta peningkatan fitur sistem agar lebih user-friendly bagi semua kalangan. Dengan langkah-langkah tersebut, adaptasi terhadap sistem digital akan berjalan lebih efektif dan mendukung efisiensi pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

Hal itu ditunjang dari adanya hasil penelitian terdahulu dari Riyadi dan Palupiningtyas yang melakukan penelitian pada tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang” studi ini menjelaskan bahwasanya dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD) masih terdapat kendala adaptasi yang signifikan, khususnya dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Minimnya pemahaman operator pada sistem digital serta ketidakstabilan jaringan dan perangkat keras menjadi penghambat utama dalam proses adaptasi. Selain itu, budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital menyebabkan implementasi SIMKD belum berjalan optimal [16].

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah (SIBLUD) dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers termasuk indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi SIBLUD sudah berjalan cukup baik namun belum berjalan sesuai harapan. Pada indikator pencapaian tujuan, penggunaan SIBLUD telah membantu mempercepat proses administrasi keuangan, seperti penyusunan SPJ, rekap laporan, input data kegiatan, dan pencarian data laporan. Sistem digital ini mampu meningkatkan efisiensi kerja pegawai sehingga proses pengelolaan keuangan menjadi lebih cepat dan terstruktur. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti sistem error, maintenance, serta kebutuhan input data secara manual yang menyebabkan proses kerja terkadang mengalami keterlambatan. Pada indikator integrasi, implementasi SIBLUD telah didukung melalui adanya koordinasi dan komunikasi antara admin dengan pegawai pengguna sistem. Selain itu, sosialisasi dan pendampingan penggunaan sistem juga telah dilakukan untuk membantu pegawai memahami alur penggunaan aplikasi. Meskipun demikian, proses integrasi masih menghadapi beberapa hambatan, terutama pada pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem dan masih bergantung pada bantuan admin ketika mengalami kendala dalam pengoperasian aplikasi. Pada indikator adaptasi, pegawai Puskesmas Buduran secara bertahap telah mampu menyesuaikan diri dengan penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan. Adanya pelatihan dan pembelajaran mandiri membantu pegawai memahami penggunaan SIBLUD dalam menunjang pekerjaan administrasi. Namun, kemampuan adaptasi setiap pegawai berbeda-beda, khususnya bagi pegawai senior yang membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami sistem digital sehingga proses penyesuaian belum berjalan secara maksimal. Secara keseluruhan, implementasi SIBLUD di Puskesmas Buduran telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses administrasi. Akan tetapi, untuk mencapai efektivitas yang sesuai harapan masih diperlukan peningkatan stabilitas sistem, pengembangan fitur yang lebih fleksibel, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pelatihan serta pendampingan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Kepala Puskesmas Buduran beserta bendahara serta staf keuangan BOK yang sudah memberikan data, informasi, dan waktu untuk keperluan wawancara dan observasi. Tidak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman yang terus memberikan dukungan moral serta semangat sampai penelitian ini bisa diselesaikan secara baik. Penulis juga menghargai usaha, ketekunan, dan konsistensi diri sendiri dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil kajian ini bisa berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik pengelolaan keuangan puskesmas dimasa depan.

REFERENSI

- [1] A. R. Fauzi, A. Hakim, K. Pendayagunaan, A. Negara, R. Birokrasi, And A. Penelitian, “Digitalisasi Terhadap Pelayanan Publik (Implementasi Digitalisasi Terhadap Pelayanan Publik Di Pemerintah Kota Kediri Dan Kabupaten Jember),” *Jur Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 10, Pp. 3727–3734, 2024, Doi: 10.56338/Jks.V7i10.6146.
- [2] H. Rifdan, H. Sakawati, And M. Nur Yamin, “Analisis Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tallo Kota Makassar,” *Jurnal Governance And Politics (Jpg)*, Vol. 4, No. 1, 2024.

- [3] J. T. Nugraha, "E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, Vol. 2, No. 1, Pp. 32–42, Apr. 2018.
- [4] T. R. U. S. A. Kurnia, "E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," Pp. 170–181, 2017.
- [5] Andi, "Pemanfaatan E-Government Dalam Tatakelola Pemerintahan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya," Vol. 7, No. 2, 2020, [Online]. Available: [Http://Cipedeskec.Tasikmalayakota.Go.Id](http://Cipedeskec.Tasikmalayakota.Go.Id)
- [6] I. Anis, J. Usman, And S. R. Arfah, "Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa," Vol.2, 2021.
- [7] N. V. Rahayu And H. Sukmana, "Efektivitas Berkas Mlaku Dewe Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo," *Reformasi*, Vol. 12, No. 2, Pp. 262–272, Dec. 2022, Doi: 10.33366/Rfr.V12i2.3708.
- [8] I. D. Hasibuan, R. A. Simangunsong, R. Purba, D. H. Putri, And A. N. Ode, "Analisis Pengelolaan Keuangan Puskesmas Blud Simpang Empat Kabupaten Karo," *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 4, No. 2, Pp. 583–592, May 2024, Doi: 10.54082/Jupin.367.
- [9] S. Khofipah, I. D. Hasibuan, M. K. Errisya, M. R. Purba, And S. A. Lubis, "Analisis Pengelolaan Keuangan Di Puskesmas Sukaramai Kota Medan," *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, Jun. 2024.
- [10] A. E. Surachman *Et Al.*, "Ebook Manajemen Keuangan Di Era Digital", Apr. 2024.
- [11] M. Rahmah And R. Hayati, "Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong," *Japb*, Vol. 3, P. 2020, [Online]. Available: [Www.Keuangedesa.Info](http://www.Keuangedesa.Info).
- [12] Y. F. Huda Firdaus And M. A. Cholik, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi," *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol. 68, No. 1, Pp. 68–78, 2024, [Online]. Available: [Http://Ojs.Stiami.Ac.Id](http://Ojs.Stiami.Ac.Id)
- [13] D. Atika Santya Putri, D. Sudaryanti, And Hariri, "Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sistem Syncore Dalam Menyajikan Laporan Keuangan (Studi Kasus Di Puskesmas Kalangsari)," *E Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 12, Pp. 277–286, 2023, [Online]. Available: [Http://Jim.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jra](http://Jim.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jra),
- [14] Pramudio, I. E. H., & Choiriyah, I. U. (2025). "Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Perwujudan E-Government di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo," *Journal Publicuho*, vol. 8, no. 2, hlm. 703–718, 2025.
- [15] A. Setiyaningsih, M. E. Kaukab, And A. Fahmi Nugroho, "Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)". Vol. 3 No. 2, April 2023
- [16] A. Riyadi And D. Palupiningtyas, "Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Di Kabupaten Semarang," *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 17, No. 2, Pp. 82–88, Nov. 2024, Doi: 10.51903/Kompak.V17i2.1907.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.